

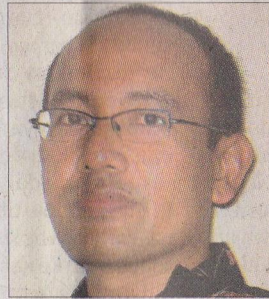
## Demagog dan Illiberal Democracy

ADA tiga konsep yang penting dan relevan disebut khususnya untuk konteks perpolitikan Surabaya dan lebih luas lagi Jawa Timur. Ketiganya adalah demokrasi, oligarki, dan demagog. Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang menganugerahkan kekuasaan berdasar apa yang diinginkan kelompok masyarakat luas. Berbeda dari demokrasi yang memperkenankan masyarakat mengambil keputusan atas perihal yang menyentuh kehidupan mereka, oligarki justru membuat keputusan berdasar apa yang diinginkan sekelompok kecil dari masyarakat (baca: elite).

Karena besarnya kekuasaan yang dianugerahkan oleh sistem demokrasi, siapa pun pemegangnya, termasuk anggota parlemen, bisa bergerak ke dua pendulum besar, yakni orientasi penciptaan keadilan masyarakat atau praktik culas. Dalam kaitannya dengan potensi lahirnya praktik culas inilah, demagog muncul. Demagog sendiri terambil dari kata Yunani *Kuno demos* (rakyat) dan *agogos* (pemimpin).

Michael Signer dalam bukunya, *Demagogue: The Fight to Save Democracy from Its Worst Enemies* (2009 : 35), menjelaskan, seperti dikutip di awal tulisan ini, kata demagog dalam kehidupan keseharian bisa digunakan untuk menunjuk kepada pemimpin politik yang cenderung manipulatif, destruktif (*pernicious*), sempit pandangan, dan intoleran (*bigoted*). Dia pun lalu mengingatkan, seperti dalam kutipan di atas, demagog bisa menentang atau bahkan menjungkirbalikkan serta merusak tata aturan dan keteraturan.

Demagog dapat selalu muncul dalam sebuah sistem politik yang menganugerahkan kekuasaan kepada mereka yang memiliki kaitan dan jaringan dengan masyarakat, seperti demokrasi. Bahkan, tak jarang, demokrasi secara intrinsik bisa saja menciptakan jalan bagi munculnya demagog. Praktik



O l e h

AKH. MUZAKKI\*

demagog inilah yang oleh Fareed Zakaria (1997) disebut sebagai penyumbang besar bagi munculnya *illiberal democracy*.

Tahun 2010 masih menjadi saksi atas tumpang tindihnya kewenangan politik pemerintahan di Surabaya dan Jawa Timur secara lebih luas yang, bila tidak segera disadari, akan bermuara pada lahirnya demagog dan sekaligus *illiberal democracy*. Sebagai contoh, kelompok legislatif dan eksekutif "berlaga" di medan anggaran dan program pengembangan kota dengan saling menjegal satu sama lain. Usul penganggaran oleh sebuah pemerintahan kabupaten atau kota "disandera" oleh parlemen daerah. Alasannya simpel, yakni karena eksekutif tidak meloloskan segera usul program pembangunan hasil jaring aspirasi masyarakat (jasma) oleh parlemen. Untuk pembelaan diri, eksekutif pun lalu menguraikan argumen bahwa sejumlah proposal program pembangunan hasil jasma bermasalah dari sisi transparansi, akurasi, dan validitas data.

Kita semua memiliki kepentingan dengan terbangunnya kewenangan dan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif.

Pasalnya, sebuah praktik politik penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan yang titik batasnya serbaburam dan kemudian tidak mendapatkan kontrol penangan yang ketat dikhawatirkan akan memunculkan embrio demagog dan *illiberal democracy*.

Tidak bisa dimungkiri, praktik sandera-menyandera dalam praktik penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan politik pemerintahan masih sering terjadi. Dan kejadian ini mirip dengan perilaku koboi. Kalau di masyarakat Indian, koboi muncul untuk menunjukkan identitas diri sebagai jagoan secara fisik.

Tengoklah kasus RAPBD Surabaya 2011 lalu. Program pembangunan hasil jasma yang diusulkan para anggota parlemen tidak segera mendapatkan persetujuan wali kota. Alasannya, banyak usul pembangunan dari hasil jasma yang sulit diverifikasi. Perbedaan antara usul dan kenyataan sangat mencolok. Sebagai contoh, terdapat proposal pembangunan masjid di RW 2 Kelurahan Tambak Dono, Kecamatan Pakal, yang diajukan ke pemkot. Namun, setelah dicek ke lapangan, warga bukan mengusulkan pembangunan masjid, melainkan taman pendidikan Alquran (TPA).

Ketidakkocokan data tersebut menimbulkan konsekuensi besar karena akan berkaitan dengan anggaran. Tentu pembangunan masjid membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar daripada TPA. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, seperti dikutip *Jawa Pos* (28/12/2010), "Terus, siapa yang menulis usul pembangunan masjid dalam proposal itu?" Akhirnya, pemkot pun menunda persetujuan atas proposal pembangunan tersebut.

Kalangan parlemen pun tidak tinggal diam. Draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) disandera oleh parlemen. Tarik-menarik pun lama terjadi untuk sampai pada persetujuan oleh DPRD. Alasan yang dikemukakan anggota

dewan untuk menolak dan mengembalikan KUA-PPAS itu adalah pemkot -dalam pandangan mereka- telah menyusun program pembangunan dengan tidak berbasis dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Semangat dasar program pembangunan hasil jasma bisa digunakan untuk bahan kritik bagi eksekutif bahwa segala proyek pembangunan selayaknya berangkat dari kepentingan dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Pada saat yang sama, implementasi dari semangat dasar program pembangunan hasil jasma di atas seharusnya bisa segera memberikan kesadaran baru bahwa kaum legislatif bisa terjerumus pada praktik politik yang melampaui kewenangan intrinsiknya. Memang eksekusi program pembangunan dari hasil jasma masih berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Namun, bila kewenangan itu lalu berada di bawah sandera legislatif, kewenangan legislasi dari parlemen telah cenderung mengalami ekstensifikasi yang sulit dipertanggungjawabkan.

Apalagi, ternyata usul program pembangunan dari hasil jasma oleh parlemen memiliki banyak masalah dari sisi akurasi, validasi data, dan peruntukan efektifnya. Keganjilan lebih lanjut akan semakin mencuat saat kepentingan penggolangan proposal pembangunan dari hasil jasma harus diiringi dengan praktik sandera-menyandera atas program rutin, termasuk penganggaran pembangunan pemerintahan. Tentu kita semua tidak menginginkan munculnya demagog dan *illiberal democracy* dalam praktik penyelenggaraan kewenangan politik, yang ditandai dengan praktik yang cenderung manipulatif, destruktif, dan sempit pandangan. (\* /c9/mik)

\*) Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya